

**Judul** : DPR: Tambah Anggaran TKD  
**Tanggal** : Kamis, 11 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 4

## Pemulihan Daerah Terdampak Bencana

# DPR: Tambah Anggaran TKD

Senayan berharap Pemerintah menambah dana Transfer Ke Daerah (TKD) buat Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak musibah. Tujuannya, agar daerah cepat pulih pascabencana.

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin mengusulkan pembatalan pemotongan dana TKD bagi daerah terdampak bencana dengan cara diskresi dari Pemerintah Pusat. Usulan itu sesuai permintaan Gubernur Sumbar Mahyeldi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait penambahan TKD ke Sumbar.

"Permintaan resmi Gubernur Sumbar menggambarkan kondisi nyata kapasitas fiskal Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak bencana banjir dan longsor," ujar Khozin dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Diketahui, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyurati Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan pemotongan anggaran

TKD 2026 sebesar Rp 2,6 triliun. Tujuannya, untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.

"Pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak, dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana," ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembang, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).

Khozin melanjutkan, keberadaan TKD bagi daerah sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pelayanan publik di daerah. Sebab dana TKD berbeda dengan dana rekonstruksi dan rehabilitasi yang memang



Muhammad Khozin

dialokasikan oleh Pemus.

Dia menambahkan, dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk daerah terdampak dialokasikan sebesar Rp 51,81 triliun dan sudah disiapkan oleh Pemus. "Sedangkan TKD akan lebih fokus pada pelayanan publik di daerah pasca bencana," jelas politikus PKB ini.

Dalam situasi darurat, kata Khozin, dibutuhkan kebijakan skala prioritas untuk percepatan

rekonstruksi, termasuk untuk rehabilitasi dan optimalisasi pelayanan publik di daerah terdampak bencana. "Ini semua untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana," jelasnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Cindy Monica meminta Pemus menambah dana TKD bagi daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Sebab daerah tersebut sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran.

"Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Padahal masyarakat membutuhkan pemulihan cepat dan menyeluruh," ujar Cindy dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Cindy menilai, pemangkasan alokasi TKD tahun ini telah mengurangi ruang fiskal Pemda, sehingga menghambat proses tanggap darurat maupun pemulihan pasca bencana. Terlebih, Aceh, Sumbar, dan Sumut mengalami kerusakan infrastruktur,

hilangnya lahan pertanian, hingga terputusnya akses ekonomi yang semakin menekan masyarakat.

"Penambahan TKD bukan sekadar urusan teknis anggaran, tapi menyangkut keberlanjutan rehabilitasi infrastruktur, bantuan sosial bagi penyintas, pemulihan sentra pertanian, dan percepatan ekonomi masyarakat di daerah terdampak," jelas politikus Nas-Dem ini.

Cindy mengingatkan, Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi bencana ini. Negara harus hadir melalui kebijakan anggaran yang memihak masyarakat terdampak. "Kami berkomitmen mengawal isu ini dan mendorong skema anggaran yang adaptif terhadap kondisi bencana," tegasnya.

Cindy berharap, kebutuhan daerah terdampak bencana menjadi prioritas nasional. "Kami mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas dalam proses pemulihan," tutup dia. ■ TIF